**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian.**

Tiongkok adalah salah satu eksporter terbesar di dunia. Sejak reformasi pasar pada akhir tahun 70an, ekonomi Tiongkok telah meningkat empat kali lipat dan diperkirakan akan berlipat ganda pada dekade berikutnya[[1]](#footnote-1). Pertumbuhan Tiongkok tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2009, runtuhnya pasar ekspor internasional yang disertai krisis finansial global telah berdampak pada Tiongkok, tetapi ekonomi negara ini dengan segera tumbuh kembali[[2]](#footnote-2).

Dalam teori ekonomi sendiri dikenal istilah *The Asian Miracle* yang menandakan progres pertumbuhan ekonomi Asia yang begitu cepat. Sebelumnya, di pertengahan abad 20, negara-negara di Asia menghadapi situasi yang benar-benar kacau dimana peperangan, kemiskinan, kelaparan melanda negara-negara di kawasan tersebut. Tiongkok adalah salah satu negara yang tidak beruntung pada waktu itu karena mengalami peperangan, revolusi, dan kelaparan sekaligus. Pada tahun 1960, penghasilan satu orang Jepang sama dengan 1/8 pendapatan satu orang Amerika, Korea Selatan tidak lebih kaya daripada Sudan, Taiwan sama miskinnya seperti Zaire[[3]](#footnote-3). Namun pada empat dekade terakhir, ekonomi Asia bertransformasi. Asia kini ialah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat dibandingkan seluruh kawasan di dunia. Bahkan sekalipun dihantam oleh krisis finansial dan resesi pada akhir 90an, Asia dengan cepat bangkit dan kini merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

Fenomena *The Asian Miracle* ini tidak terlepas dari peran Tiongkok sebagai ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia setelah Amerika. Tiongkok memperluas pengaruh dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya melalui kerjasama perdagangan, bantuan infrastruktur, investasi, dan strategi ekonomi[[4]](#footnote-4). Seiring dengan kekuatan ekonomi yang terus berkembang, Tiongkok kini juga ingin memainkan peran yang lebih dominan dalam Hubungan Internasional. Sebagai emerging power, Tiongkok mulai membuat inisiatif-inisiatif tatanan baru dimana Tiongkok tidak hanya ada didalamnya, tetapi juga terlibat didalam proses pembuatan aturan-aturan sistem global yang selama abad modern ini hampir tidak pernah mengikutsertakan Tiongkok.

Hubungan bilateral Tiongkok dengan Indonesia sudah sangat lama, baik secara hubungan antar negara maupun hubungan yang di akibatkan oleh individu. Hubungan Indonesia tak lepas dari permasalahan sosial maupun geopolitik yang telah berlangsung dan sedang beranglansung. Dalam hubungan ekonomi Tiongkok dengan Indonesia mengalami perubahan menjadi perdagangan bebas yang awalnya berdangan tertutup karena sifat Tiongkok yang tertutup terhadap perdagangan bebas internasional.

Setelah revolusi ekonomi, Tiongkok memiliki pertumbuhan perekonomian terpesat di dunia, pertumbuhan ekonominya yang pesat bisa dilihat dari segi GDP pada kuartal pertama tahun 2016 meskipun Tiongkok memiliki rasio pertumbuhan GDP 6.7 persen pertumbuhan GDP Tiongkok tersebut membuat Tiongkok berada pada posisi kedua setelah India, dengan inflasi 1.9 persen, dan pada tahun 2015 total GDP Tiongkok sebesar 10.866 juta dolar[[5]](#footnote-5).

Tiongkok memiliki nilai ekspor perdagangan 1810.64 juta dolar pada tahun 2015, ini meningkat daripada tahun lalu hanya 1727.63 triliyun dolar, dan nilai impor Tiongkok naik menjadi 1310.84 triliyun dolar dari asalnya hanya 1272.00 juta dolar. Tiongkok pada april 2016 memiliki cadangan devisa sekitar 12.000 triliyun dolar devisa Tiongkok meningkat karena hasil penerimaan ekspor.[[6]](#footnote-6) Ekspor adalah sumber devisa yang sangat di butuhkan suatu negara dalam perekonomian karena ekspor yang tinggi akan meningkatkan jumlah produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehinga memberikan stabilitas terhdap ekonomi nasional suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan dana besar untuk melakukan pembangunan dan perbaikan pembanguan yang telah tercapai sebelumnya. Akan tetapi pembagnunan memerlukan dana yang sangat besar guna tercapainya pembangunan tersebut, karenanya kebijakan pemerintahan Indonesia berusaha agar dapat mengumpulkan dana yang bisa digunakan membiayai pembangunan, agar tercapainya pemulihan ekonomi, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penyerapan dana melalui investasi asing maupun dalam negeri.

Dana dari luar negeri atau investasi asing sangatlah membantu dalam mencapai pembanguan suatu negara, jika suatu pembanguan memerlukan dana yang besar dan negara tersebut tidak memiliki dana maka investasi asing dapat di lakukan. Investasi asing berdampak postif terhadap kemajuan perekonomian suatu negara, karena dari investasi asing menbawa efek domino yang berupa *transfer of technology*, investasi asing bukan hanya mengatasi kekurangan dana pembanguan tetapi mengefesiensikan pembanguan.

Tiongkok adalah salah satu negara investor dalam pendanaan proyek-proyek pembanguan di Indonesia, yang menjadi fokus dari pendanaan proyek yang didanai Tiongkok adalah proyek infrastrukutur seperti pembanguan Bandara, Kereta Cepat, Jalan Raya, Bendungan, Pelabuhan dan pengembangan suatu kawasan seperti perumahan dan sebagainya.

Pembanguan infrastruktur membuka peluang untuk Tiongkok mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan sosial politik serta hukum, seperti periode 2010-2014, nilai investasi yang masuk dari Tiongkok mencapai US$ 1,5 miliar. Angka ini bila dirata-rata hanya US$ 495 juta, bila dibandingkan dengan periode 2015, angkanya meningkat 26% menjadi US$ 628 juta[[7]](#footnote-7), dan kebijakan pemerintah Indonesia yang di pengaruhi Tiongkok di bidang ekonomi bertujuan untuk membuat laju pertumbuhan ekspor meningkat, jika penerimaan dari bidang ekspor meningkat maka pemerintahan Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar hutang luar negri tersebut.

Investasi Tiongkok ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat pada triwulan pertama tahun 2016 dengan nilai total 464,6 juta dolar AS. Indonesia menjadi negara ke dua investasi Tiongkok di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut data BKPM realisasi nilai investasi china meningkat dari tahun sebelumnya pada triwulan pertama tahun 2015 yang lalu realisasi investasi china hanya sebesar USD 75,1 juta, terlihat bahwa kenaikan investasi Tiongkok secara signifikan atau naik 518,6%[[8]](#footnote-8). Tiongkok sekarang menjadi investor tersbesar kedua setelah Singapura di susul Jepang dan Hongkong.

Investasi Tiongkok juga akan menciptakan perubahan dalam beberpa hal seperti :

1. Perbaikan kebijakan publik yang tanggap terhadap rakyat miskin dan perbaikan tata pemerintahan.
2. Perbaikan prioritas seperti Perbaikan tatacara promosi dalam menarik investasi secara professional, yang di barengi perubahna sistem perdagangan luar dan dalam negri, membangun pasar keuangan yang bersaing, mendorong persaingan swasta.
3. Membangun sistem pelayanan pemerintah terhadap investasi yang lebih mudah.

 Tiongkok dalam praktek pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia selalu menerapkan peraturan yang menguntukan Tiongkok, seperti tenaga pelaksana teknis proyek bisanya berasal dari warga negara Tiongkok termasuk untuk tenaga analisis dan kemitraan strategis, dan hanya menggunakan sedikit sumber daya manusia lokal. Hal tersebut diterapkan pemerintah Tiongkok untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak seperti kebocoran dana dalam pelaksanaan teknis pembanguan proyek-poryek yang di biayai Tiongkok.

Pembangunan infrastruktur yang di biaya oleh Tiongkok dapat meningkatkan mobilitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi naik. Beberapa pembangunan yang menjadi prioritas pembanguan hasil investasi Tiongkok di bidang infrastruktur, adalah :

1. Pembangunan utama, seperti pembanguan jalan tol, pembangkit listrik, pembangunan transportasi publik yang dapat mendorong mobilitas masyarakat.
2. Pembanguan pendukung seperti pembanguan sekolah atau perumahan rakyat yang mana dapat mensejahterakan masyarakat karena pengaturan tata ruang publik teratur dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam proses pembahasan masalah ini, penulis mencoba mengambil beberapa teori dan konsep yang mempunyai relevansi dengan *core subject* pada Ilmu Hubungan Internasional terutama Ekonomi Internasional dan Politik Luar Negeri, sekalipun tidak menutup kemungkinan memiliki kolerasi dengan *core subject* lainnya, yaitu Investasi Luar Negeri dan Diplomasi pada pembahasan selanjutnya. Restrukturisasi skala besar yang tengah berlangsung di Tiongkok hanyalah bagian dari program ambisius untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang didanai pemerintah memasuki pasar internasional. Termasuk reformasi kepemilikan campuran diharapkan dapat membantu Tiongkok membuat terobosan dalam reformasi badan usaha milik negara (BUMN), meski masih menghadapi sejumlah tantangan.

Tiongkok memiliki sekira 150.000 BUMN, dengan aset senilai lebih dari 100 triliun yuan (setara Rp194 kuadriliun), dan mempekerjakan lebih dari 30 juta orang. Hasil dari reformasi BUMN juga mulai terlihat. Laba gabungan BUMN kembali bertumbuh pada Oktober setelah mencatat penurunan sejak awal tahun, menurut Kementerian Keuangan. Dalam 10 bulan pertama, BUMN berhasil meraup laba gabungan sebesar 1,92 triliun yuan (setara Rp3,7 kuadriliun).

Walaupun tengah mengalami perlambatan, Tiongkok mendorong proses merger dan akuisisi (M&A) BUMN yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi. Dana nasional sebesar 350 miliar yuan (sekira Rp 679 triliun) telah dianggarkan tiga bulan lalu untuk mempercepat proses tersebut[[9]](#footnote-9).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian milestones proyek prioritas[[10]](#footnote-10).

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia dalam bentuk skripsi, dengan berjudul : **“REALISASI INVESTASI INFRASTRUKTUR TIONGKONG DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA”.**

1. **Identifikasi Masalah.**

Dalam uraian di atas untuk memudahkan dalam menganalisa masalah , penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. B agaimana realisasi investasi Infrastuktur Tiongkok di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi infrastuktur Indonesia sebelum investasi infrastuktur Tiongkok?
3. Bagaimana dampak investasi infrastruktur Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah.**

Agar pembatasan masalah tidak keluar dari topik yang akan di bahas serta di karenakan banyaknya faktor yang mendukung, maka pembatasan pasa realisasi investasi infrastulktur Tiongkok ke Indonesia terutama yang mendukung proyek infrastuktur.

1. **Rumusan Masalah.**

Perumusan masalah di ajukan untuk memudahkan menganalisa mengenai permasalahan yang di dasarkan pada identifikasi masalah, maka penulis akan menarik *research question* dari permasalahan tersebut sebagai berikut : **Bagaimankah investasi infrastruktur Tiongkok dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga produk-produk Indonesia memiliki daya saing dengan produk-produk negara lain.**

1. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Mengetahui bagaimana investasi infrastuktur tiongkok di Indonesia.?
4. Mengetahui bagaiamana kondisi inrastuktur Indonesia sebelum investasi infrastuktur .
5. Mengetahui dampak investasi infrastruktur Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
6. **Kegunaan Penelitian**
7. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis mengenai investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia.
8. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai proyek infrastruktur di Indonesia.
9. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian kepada hubungan bilateral ekonomi Indonesia - Tiongkok.
10. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
11. **Kerangka Teoritik, Hipotesis Penelitian, Operasionalisasi Variabel dan Skema Kerangka Teoritik.**
12. **Kerangka Teoritik.**

Dalam konteks dimana terjadinya saling kepentingan dan ketergantungan antar Negara, maka suatu Negara perlu mengadakan interaksi dengan Negara lain, yang semakin mendorong terjadinya suatu kerjasama yang bersifat. Dalam konteks hubungan internasional terdapat banyak factor yang mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan suatu negara terhadap negara lainya . Hubungan Internasional adalah ilmu yang membahas tentang interaksi yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang melewati batas Negara baik secara formal mamupun non-formal. Dari berbagai interaksi yang terjadi dalam konteks hubungan internasional salah satunya adalah aktivitas ekonomi internasional. Yang di hubungkan dengan perkembangan dan fenomena global, dimana kekuatan negara lain menjadi topic utama dalam kajian Hubungan Internasional.

Dalam hal ini penulis pertama pertama mengambil pengertian hubungan internasional seperti yang di kemukakan Menurut **K.J Holsti** definisi Hubungan Internasional, yaitu :

**Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat oleh pemerintah atau warganegara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap Politik Luar Negeri atau Politik Internasional, dan meliputi segala segi hubungan antar berbagai Negara dunia meliputi kajian terhadap lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Transportasi, Komunikasi dan Perkembangan Nilai-nilai dan Etika Internasional[[11]](#footnote-11)**

Kajian dalam studi Hubungan internarnasional tidak hanya menegenai sejarah diplomasi saja, akan tetapi mencakup juga segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan bernegara di dalam mengadakan hubungan antar bangsa yang satu dengan lainya. Di dalam mengadakan hubungan antar bangsa yang satu dengan lainya. Di dalam juga terdapat berbagai hubungan yang pada dasarnya adalah hubungan saling ketergantungan antara lain adalah hubungan ekonomi internasional seperti yang di kemukakan oleh **Soediyono R**, yaitu :

**Ilmu ekonomi internasional yang sering pula kita sebut ekonomi internasional kiranya dapat di definisikan sebagaian dari pada ekonomi yang khususnya mempelajari perilaku transaksi ekonomi internasional perekonomian bangsa pada khusunya dan mekanisme bekerja suatu perekonomian dunia pada umumnya**

Ekonomi internasional tidaklah mudah tanpa adanya kerjasama internasional, karenanya Dougherty dan Pfalztgraff seacra teori mendefinisikan kerjasma dan kerjasama internasional sebagai berikut :

**Kerjasama dapat di definisikan sebagai berikut serangkaian hubungan-hubungan yang tidak di dasarkan pada kekerasan atau pelaksanaan dan di sahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang di definisikan sebagai perangkat aturan yang di setujui regulasi-regulasi dan norma-norma. Dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan dimana harapan-harapan para kator dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional**

Kerjasama yang terbangun antara satu negara dengan negara lainya di wadahi oleh suatu organisasi internasional yang telah di sepakati tujuanya dan di atur oleh suatu peraturan yang mengikat agar tidak adanya suatu pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu negara anggota. Agar tidak terjadinya kerugian bagi anggota lainya.

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa – bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar bangsa yang mana terselegaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan internasioal baik melalui berbagai kriteria seperti terselaranya suatu hubunga bersifat bilateral regional, maupun multiteral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral yakni :

**Suatu bentuk kerjasama di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di sebrang lautan dangan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.**

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, didi krisna mendefinsikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa: **“Hubungan bilateral adalah suatu keadaan yang mengembarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara).**

Dalam pelaksananya berbagai kegiatan ekonomi tidak berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat begitu saja di lepaskan oleh aktifitas-aktifitas politik. Seperti pengertian ekonomi politik internasional yang di kemukakan **Mochtar Mas,oed,** yaitu : **“studi saling berkaitan dan interaksi antara fenomena-fenomena politik dengan fenomena-fenomena ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan internasional dan antar pemerintah”**.

Usaha penanaman modal (investasi) bagaian dari kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kinerja industri besar maupun kecil, serta membangun infrastuktur guna memperlancar perekonomian dan menambahkan lapangan kerja baru. Pengertian investasi menurut Paul A. sumeslon dan W.D Nordhaus dalam bukunya *ekonomi makro*, bahwa : **“Investasi merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, modal berupa dana dan jasa (seperti transportasi pinjaman dan dana)”[[12]](#footnote-12)**

Pertumbuhan ekonomi menurut Michael P Tadaro pada umumnya didefiniskan sebagai berikut.

**Pembangunan ekonomi adalah sebagai kapasitas dari sebuah perekonomiannasional untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (gross national product) pada tingkat lebih tinggi yang diluar melalui tingkat perekonomian [[13]](#footnote-13).**

Pembanguan menurut Sodosono Sukiro beranggapan bahwa: **“Pembanguan merupakan suatu proses yang akan menciptaka perombakan dalam kehidupan ekonomi politik dan social masyarakat”[[14]](#footnote-14).**

Sejak semula fokus dari hubungan internasional adalah mempelajari tentang menyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat diciptakan sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengatisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor lainya. Kerjasama dapat di jalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing- masing pihak saling tahu sehingga tidak lagih di perlukan suatu perundingan.

Kondisi perekonomian Tiongkok yang sangat pesat menjadi pertimbangan strategi bagi negara-negara maju dalam melihat Tiongkok secara keseluruhan, karena adanya kekhawatiran barat dengan bangkitnya ekonomi Tiongkok sebagai suatu kekuatan ekonomi dunia di dalam kawasan Asia Timur. Sejalan dengan pemikiran tersebut menurut T. May Rudi dalam bukunya *Sejarah Diplomasi* dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mempersembahkan gabungan pandangan dari spesialis terkemuka dalam berbagai bidang yang perlu di ketahui oleh para pengambil keputusan di seluruh dunia, baik dalam bisnis profesi keungan ,media masa, diplomasi ataupun politik dalam mengevaluasi tiongkok dan potrnsinya di masa depan[[15]](#footnote-15)**

Penenaman modal asing sangat di perlukan untuk mempercepat pembanguanan ekonomi, investasi asing membantu industrialisasi dalam membangun modal ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, tidak hanya membawa mesin dan uang tetapi juga membawa ketarampilan teknik semenjak tiongkok membuka dirinya terhadap dunia internasional.

Menurut Presiden CCPIT (*China Council for the Promotion of International Trade*) Chen Quiyan, mengemukakan bahwa :

**Upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan membangun iklim investasi yang lebih baik mendapatkan respons positif dari kalangan investor provinsi Guangdong, Cina. dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)[[16]](#footnote-16).**

Investasi Tiongkok meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir dan diharapkan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi Indonesia. Setiap negara memerlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang di wujudkan dengan pembangunan ekonomi. Walau kebijakan-kebijakan pembanguan ekonomi selalu di tunjukan untuk mempertinggi kesejahtraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan pembanguan selalu di pandang sebagai sebagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga harus didukung oleh pembangunan infrastuktur untuk memperlacar pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal teserbut pengertian infrastruktur menurut pendapat [Sullivan dan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_O%27_Sullivan&action=edit&redlink=1) M. Sheffrin [[17]](#footnote-17), adalah :

**Infrastruktur di Indonesia termasuk** [**fisik**](https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik) **dan** [**sosial**](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) **dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa** [**jalan**](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan)**,** [**kereta api**](https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api)**,** [**air bersih**](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_bersih)**,** [**bandara**](https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara)**,** [**kanal**](https://id.wikipedia.org/wiki/Kanal)**,** [**waduk**](https://id.wikipedia.org/wiki/Waduk)**,** [**tanggul**](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggul)**,** [**pengelolahan limbah**](https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah)**,** [**perlistrikan**](https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik)**,** [**telekomunikasi**](https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi)**,** [**pelabuhan**](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan) **secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,** [**distribusi**](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi) **aliran** [**produksi**](https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi)[**barang**](https://id.wikipedia.org/wiki/Barang) **dan** [**jasa**](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa) **sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan** [**transportasi**](https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi) **pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.**

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tentunya dimaksudkan untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang telah diamanatkan dalam RAPBN, karenaya untuk memperkuat program pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi Indonesia haruslah benar-benar stabil agar semua proyek pembangunan infrastruktur tidak terhenti ditengah jalan. Sependapat dengan hal itu disampaikan oleh Mubyarto, sebagai berikut[[18]](#footnote-18) :

**Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan Sistem Ekonomi Pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.**

Memperkuat sistem perekonomian yang dianut Indonesia, juga dikemukakan oleh Emil Salim[[19]](#footnote-19), sebagai berikut :

**Sistem Ekonomi Pancasila sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. Lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu Negara.**

Sedangkan pendapat Sumitro Djojohadikusumo[[20]](#footnote-20) menegaskan bahwa, **“... yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta”**.

Mempelajari sistem perekonomian yang dianut Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Pancasila, dapatlah penulis simpulkan bahwa perekonomian Indonesia menghendaki adanya kesimbangan, dengan perencanaan melalui RAPBN, dimana pembangunan infrastruktur yang dapat berdampak pada kesejahteraan akan menjadi domainnya pemerintah sebagai pihak penjamin tercapainya pembangunan infrastruktur yang dalam pelaksanaan proyeknya melalui BUMN-BUMN di bidangnya masing-masing. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak pada kepentingan masyarakat luas akan menjadi domainnya pihak swasta tanpa ada jaminan dari pemerintah apabila pembangunan infrastruktur tersebut mengalami kegagalan.

Memperhatikan teori dan pendapat para pakar diatas maka dapat di tarik konklusi, sebagai berikut : “Masuknya pinvestasi infrastruktur Tiongkok ke Indonesia telah mendorong kemajuan ekonomi nasional Indonesia dan telah menumbuhkan minat invetasi indutsri dan jasa di Indonesia”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan konklusi diatas, dapat dikemukakan beberapa asumsi, sebagai berikut :

1. Adanya satu sasaran yang ingin di capai oleh pemerintahan Joko Widodo agar produk Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, maka perbaikan infrastruktur pendukung distribusi dan ekonomi nasional mendapat perhatian dan menjadi fokus utama.
2. Adanya minat yang besar dari Tiongkok untuk berinvetasi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia telah meningkatkan minat invetasi barang, jasa dan industri di Indonesia.
3. **Hipotesis Penelitian.**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, makapenyusun menarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : **“Jika realiasasi investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia diarahkan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa serta mempermudah perdagangan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat ditandai dengan meningkatnya capaian daya beli masyarakat dan meningkatnya ekspor produk Indonesia ke luar negeri”.**

Untuk memperjelas hipotesis, peneliti mengajukan definisi oprasional, sebagai berikut :

1. Perencanaan investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia merupakan suatu keinginan besar Tiongkok untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur yang dicangankan Indonesia melalui Bappenas dan BKPM.
2. Mudahnya distribusi barang dan jasa serta perpindahan penduduk antar pulau dan transaksi perdagangan diharapkan dapat menekan biaya distribusi yang berpengaruh pada turunnya harga jual suatu produk atau jasa, sehingga akan menjadikan barang dan jasa Indonesia bersaing dengan negara lain.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator penerimaan negara dari pajak, barang dan jasa.
4. Meningkatnya daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk memiliki/membeli barang dan jasa, semakin tinggi daya beli masyarakat berarti semakin meningkat kesejahteraan suatu masyarakat.
5. Meningkatnya ekspor barang dan jasa Indonesia ke luar negeri dapat dilihat dari penerimaan negara dari ekspor.
6. **Operasionalisasi Variabel.**

Operasionalisasi variabel penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas :Jika realiasasi investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia diarahkan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa serta mempermudah perdagangan  | 1. Investasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia
2. Proyek infrastruktur di Indonesia
3. Mempermudah distribusi barang dan jasa
4. Mempermudah transaksi perdagangan di Indonesia
 | 1. Minat yang tinggi dari Tiongkok
2. Penguasaan teknologi Tiongkok
3. Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok
4. Keberhasilan reformasi BUMN Tiongkok
5. Bandar Udara
6. Pelabuhan niaga
7. Jalan tol
8. Relisasi kereta api
9. Lancarnya distribusi barang dan jasa
10. Cepat sampainya pengiriman barang dan jasa
11. Murahnya biaya angkut barang dan jasa
12. Tingginya perpindahan barang dari produsen ke konsumen
13. Tingginya transaksi online
14. Tingginya perpindahan uang
 |
| Variabel Terikat :Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat ditandai dengan meningkatnya capaian daya beli masyarakat dan meningkatnya ekspor produk Indonesia ke luar negeri | 1. Meningkatnya ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya daya beli masyarakat
3. Meningkatnya ekspor Indonesia
4. Perbaikan pelayanan birokrasi bagi investasi
 | 1. Tingginya GDP Indonesia
2. Rendahnya inflasi
3. Tumbuhnya invetasi industri barang dan jasa
4. Murahnya produk yang dijual
5. Banyaknya pilihan barang dan jasa
6. Tingginya permintaan barang dan jasa
7. Lalu lintas muat meningkat di pelabuhan niaga
8. Rendahnya suku buka pinjaman
9. Penerapan ijin satu atap
10. Pelayanan ijin ekspor online
11. Penempatan SDM sesuai keahliannya
 |

1. **Skema Kerangka Teoritik.**

Mempermudah pemahaman penelitian, penulis buatkan skema kerangka teoritik, sebagai berikut :



1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.**
2. **Metode Penelitian.**
3. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskriptipkan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang dengan. Cara mengumpulan, menyusun menginprestasikan data yang kemudian di ajukan dengan menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode menganalisa suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dan peristiwa masa sekarang yang ada hubungan dengan invetasi infrastruktur Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan sehubungan dengan adanya hubungan bilateral Indonesia - Tiongkok.
5. **Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literature, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelahaan/penelusuran literature , pada penulisan ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip artikel , jurnal, majalah surat kabar dokumen serta media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian.**
2. **Lokasi Penelitian.**

Dalam penelitian ini tim penyusun memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagi tempat dia antaranya :

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.
2. Perpustakaan UNPAR Jalan CiumbuleuitNo.94, Hegarmanah, Cidadap, Bandung.
3. Perpustakaan SESKOAD Jalan Gatot Subroto Bandung.
4. CSIS, Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta.
5. Kementerian Perindustrian RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950.
6. Kementerian Perdagangan RI, Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110.
7. Kementerian Bappenas, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310.
8. BPKM, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190.
9. KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Indonesia
10. Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, Jl. Mega Kuningan No.2, RT.5/RW.2, Kuningan Tim., Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, Indonesia.
11. Pusat Informasi Kompas, Gedung Kompas Gramedia
Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta Pusat 10270.
12. **Lamanya Penelitian.**



1. **Sistematika Penulisan.**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I : Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Pembahasan Variabel Bebas. Berisi tentang pembahasan perencanaan inventasi infrastruktur Tiongkok di Indonesia.

## BAB III : Pembahasan Variabel Terikat. Berisi tentang pembahasan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## BAB IV : Pembahasan Analisis. Berisi hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian.

## BAB V : Kesimpulan. Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas.

1. Ikenberry, G (2008) The Rise of China and The Future of The West: Can the Liberal System Survive?, Foreign Affairs,  January/February Issue. [↑](#footnote-ref-1)
2. BBC (2014), ‘China Profile’, BBC News Asia, December 10, tersedia di: http://www. bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877 (diakses 15 Desember 2016) [↑](#footnote-ref-2)
3. Rowher, J. (1995), Asia Rising: Why America Will Prosper as Asia’s Economy Boom?, New York: Simon & Schuster. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amelia Rahmawaty, **Kebangkitan Kekuatan China Di Awal Abad 21 dalam Center Defense and Maritim Studies, 2015** [↑](#footnote-ref-4)
5. Pertumbuhan ekonomi china menurut world bank <http://www.tradingeconomics.com/china/indicators> di akses pada 13 juli 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. Pertumbuhan ekonomi china menurut world bank <http://www.tradingeconomics.com/china/indicators> di akses pada 13 juli 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3153572/meningkat-26-realisasi-investasi-china-di-2015-lampaui-rata-rata-5-tahun> 15 desember 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://bpmptsp.gorontaloprov.go.id/tingkatkan> investasi - china - Bkpm siapkan promosi di akses 13 juli 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tinjauan Ekonomi: Tiongkok Fokus Ciptakan Terobosan dalam Reformasi BUMN [↑](#footnote-ref-9)
10. http://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/ [↑](#footnote-ref-10)
11. K. J Holisti “*politik internasional suatu kerangka analisa”, (*Bandung:Bina cipta, 1987) hlm 33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Paul A. Sumclson dan northdhaus *”ecomocis*”, (Jakarta: 1992) hlm 512 [↑](#footnote-ref-12)
13. Michael P.Todaro, pembanguan ekonomi dunia ketiga ( terjemahan Drs.munadar M.A)(jakarta,Erlangga),hlm.17 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sadono sukiro , ekonomi pembanguan proses,maslah dan dasar kebijakan (jakarta,Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1995). Hlm 104 [↑](#footnote-ref-14)
15. T.May Rudi*, “sejarah dan perkembangan politik di asia,*”(Bandung,Bina budhaya 1998) hlm 80 [↑](#footnote-ref-15)
16. Franky Sibarani [↑](#footnote-ref-16)
17. [Sullivan, arthur](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_O%27_Sullivan&action=edit&redlink=1); Steven M. Sheffrin (2003). [*Economics: Principles in action*](http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4). Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 474. [ISBN](https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number) [0-13-063085-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa%3ASumber_buku/0-13-063085-3)., diakses tanggal 14 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mubyarto teori-sistem-perekonomian-indonesia, pengantar system ekonomi pembanguanan Indonesia,hlm 76 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, sumber : *ibid*, diakses tanggal 14 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-20)